

ANALISIS PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI PERADAPAN ISLAM MASA KHULAFUR RASYIDIN

Ichsanul Reihan Adel¹, Wahyudi², Rozi Andrini³

¹ Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

² Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

² Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
22490314738@students.uin-suska.ac.id¹), wahyudisalim002@gmail.com²),
rozi.andrini@uin-suska.ac.id³)

Article history:

Received: 01-06-2025

Revised 02-07-2025

Accepted 23-07-2025

Abstract:

This research discusses the social and economic analysis during the Khulafaur Rasyidin period. The main problem examined is how the policies implemented by Abu Bakar, Umar, Utsman, and Ali impacted the economic development and social stability of the Muslim community. The objective of this study is to analyze and describe the effects of social and economic policies during that era on the establishment of a strong and sustainable Islamic civilization foundation. The method used is a literature study with a descriptive approach, where data is obtained from books, scientific articles, and relevant published documents. The data is systematically analyzed to map the impact of zakat policies, wealth distribution, infrastructure development, and internal conflicts that occurred. The conclusion of this research indicates that the Khulafaur Rasyidin period serves as an important foundation for the development of the Islamic socio-economic system. Although various political challenges and internal conflicts hindered economic growth during Ali's time, the policies of zakat redistribution and administrative reforms implemented by the other caliphs significantly contributed to the social and economic welfare of the Muslim community.

Keywords: Khulafaur Rasyidin, Social, Economy

Abstrak:

Penelitian ini membahas analisis sosial dan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin. Pokok masalah yang dikaji adalah bagaimana kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi dan stabilitas sosial umat Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak dari kebijakan sosial-ekonomi pada era tersebut terhadap pembentukan fondasi peradaban Islam yang kuat dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh dari buku-buku, artikel ilmiah, dan dokumen relevan yang diterbitkan. Data dianalisis secara sistematis untuk memetakan dampak kebijakan zakat, distribusi kekayaan, pembangunan infrastruktur, serta konflik internal yang terjadi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa masa Khulafaur Rasyidin menjadi fondasi penting bagi perkembangan sistem sosial ekonomi Islam. Meski berbagai tantangan politik dan konflik internal menghambat pertumbuhan ekonomi di masa Ali, kebijakan redistribusi zakat dan reformasi administrasi yang diterapkan oleh para khalifah lainnya memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam.

Kata Kunci: Khulafaur Rasyidin, Sosial, Ekonomi

PENDAHULUAN

Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan salah satu periode penting dalam sejarah Islam yang dikenal dengan pembentukan dan pengembangan tata kelola pemerintahan serta sistem sosial ekonomi yang berbasis pada ajaran Islam. Masa ini dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M hingga berakhir pada tahun 661 M, yang ditandai dengan kepemimpinan empat khalifah yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Ash-

Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin AbiThalib.¹ Pada periode ini, terjadi perkembangan yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Masa ini menjadi tonggak awal bagi pembentukan sistem ekonomi dan sosial yang adil dan merata, serta membawa dampak besar terhadap perkembangan peradaban Islam di masa-masa berikutnya.²

Khulafaur Rasyidin bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin politik dan ekonomi yang berusaha menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pada masa itu adalah menyatukan berbagai suku dan kelompok di wilayah Jazirah Arab yang masih kental dengan semangat kesukuan, sekaligus mengelola sumber daya ekonomi yang berkembang pesat seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Dalam konteks sosial dan ekonomi, para Khulafaur Rasyidin berupaya menciptakan sistem yang adil dan merata, yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memastikan kesejahteraan umat secara keseluruhan.³

Pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, fokus utama adalah menstabilkan kondisi politik dan sosial umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu langkah penting yang diambil oleh Abu Bakar adalah memerangi kelompok-kelompok yang enggan membayar zakat. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan ketaatan umat kepada ajaran Islam, tetapi juga sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Muslim. Zakat, sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, memainkan peran penting dalam redistribusi kekayaan, dan dengan memastikannya berjalan dengan baik, Abu Bakar berupaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.⁴

Pada masa Umar bin Khattab, perkembangan sosial dan ekonomi Islam mencapai puncaknya. Umar dikenal sebagai khalifah yang visioner, dengan sejumlah kebijakan revolusioner dalam bidang administrasi dan ekonomi. Salah satu kebijakan penting yang diambil Umar adalah pendirian baitul mal, lembaga keuangan negara yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan keuangan umat.⁵ Baitul mal berperan penting dalam menampung dan mengelola pemasukan negara dari berbagai sumber, termasuk zakat, jizyah (pajak bagi non-Muslim), dan kharaj (pajak tanah). Dana yang terkumpul di baitul mal kemudian digunakan untuk kepentingan umat, seperti pembangunan infrastruktur,

¹ Faruqi & Raji, I. (2016). *Islamic Social and Economic Systems*. Kuala Lumpur: Islamic BookTrust. h 45-47.

² Khan, Fahim. (2017). *Essays in Islamic Economics*. Islamabad: International Institute of Islamic Economics. h 100-103.

³ Iqbal & Zamir. (2018). *Islamic Finance and Economic Development: Risk, Regulation, and Corporate Governance*. New York: Palgrave Macmillan. h 154-156.

⁴ Ahmed & Habib. (2016). *Islamic Economic Institutions and the Elimination of Poverty*. London: Islamic Relief Worldwide. h 125-127.

⁵ Auda & Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. (London: International Institute of Islamic Thought, 2017). h 105-110.

pembayaran gaji pegawai negara, serta bantuan kepada kaum fakir miskin. Sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel ini menjadi salah satu fondasi penting bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial pada masa Umar.⁶

Selain itu, Umar juga menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang bersifat inklusif dan berpihak kepada rakyat kecil. Misalnya, Umar memperkenalkan sistem tanah wakaf dan mendistribusikan tanah-tanah yang ditaklukkan kepada para petani dengan ketentuan bahwa mereka harus mengolahnya dan membayar pajak yang adil.⁷ Kebijakan ini tidak hanya membantu meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial antara golongan kaya dan miskin. Di bawah kepemimpinan Umar, peradaban Islam berkembang pesat, baik dari segi ekonomi maupun sosial, dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan yang menjadi landasan utamanya.⁸

Pada masa Utsman bin Affan, wilayah kekuasaan Islam semakin meluas hingga mencakup wilayah Persia, Mesir, dan sebagian besar wilayah Kekaisaran Bizantium.⁹ Perluasan wilayah ini membawa dampak signifikan terhadap perekonomian umat Islam, dengan meningkatnya sumber daya alam dan pemasukan negara. Utsman juga melanjutkan kebijakan pendahulunya dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi umat, meskipun masa kepemimpinannya diwarnai dengan tantangan politik yang cukup besar. Salah satu kebijakan ekonomi yang menonjol pada masa Utsman adalah pengembangan armada dagang, yang memainkan peran penting dalam meningkatkan aktivitas perdagangan di wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan.¹⁰ Perdagangan internasional pada masa ini menjadi salah satu pilar utama perekonomian Islam, dengan kota-kota seperti Makkah dan Madinah menjadi pusat perdagangan yang strategis.

Ali bin Abi Thalib, sebagai khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin, menghadapi tantangan politik yang sangat kompleks, termasuk perpecahan internal di kalangan umat Islam.¹¹ Meskipun demikian, Ali tetap berusaha mempertahankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi yang telah diterapkan oleh pendahulunya. Salah satu kebijakan penting Ali adalah memperkuat sistem administrasi keuangan negara dan memastikan distribusi kekayaan yang adil.¹² Ali juga sangat menekankan pentingnya menjaga integritas dan moralitas para pemimpin dalam mengelola harta umat, serta memerangi praktik-praktik korupsi yang mulai muncul di kalangan pejabat negara.¹³

⁶ *Opcit.* h 160-165.

⁷ Chapra & Umer, M. (2017). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation. h 110-117.

⁸ *Opcit.* h 130-135.

⁹ *Opcit.* h 60-62.

¹⁰ *Opcit.* 170-175.

¹¹ Auda & Jasser. (2017). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought. h 115-118.

¹² *Opcit.* h 120-125.

¹³ *Opcit.* h 110-112.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur (*literature review*) sebagai metode utama. Studi literatur adalah metode yang mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang telah ada, baik itu buku, artikel ilmiah, maupun dokumen lainnya, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang topik yang diteliti.¹⁴ Dalam konteks penelitian ini, studi literatur dilakukan dengan cara mengkaji berbagai buku dan sumber ilmiah yang relevan dengan perkembangan sosial dan ekonomi peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Studi literatur digunakan karena metode ini memungkinkan peneliti untuk merangkum berbagai pandangan dan informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya, sehingga memberikan pemahaman yang lebih luas dan komprehensif.

Penelitian ini mengandalkan buku berfokus pada sejarah peradaban Islam dan ekonomi Islam. Studi literatur memberikan kelebihan berupa pemahaman mendalam tanpa harus melakukan penelitian lapangan, sehingga lebih efisien dalam hal waktu dan sumber daya.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau sifat-sifat dari objek yang diteliti.¹⁶ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana sistem sosial dan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin diterapkan dalam pemerintahan dan kehidupan umat Islam. Pendekatan ini membantu untuk memetakan dan menjelaskan kebijakan-kebijakan sosial dan ekonomi yang diterapkan oleh masing-masing khalifah serta dampaknya terhadap masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini sumber data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli, dalam hal ini adalah buku-buku, artikel ilmiah, dan dokumen yang diterbitkan. Sumber Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku terbaru yang relevan dengan topik penelitian.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Sistem Sosial Ekonomi

1. Masa Abu Bakar As-Siddiq tahun 632–634 Masehi atau 2 Tahun

a) Kebijakan Sosial

Salah satu kebijakan utama Abu Bakar adalah penegakan zakat sebagai instrumen

¹⁴ Yusuf, Abdullah. (2019). *Ekonomi Islam dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UII Press, h 89.

¹⁵ Nasution & Adiwarmanto. (2017). *Wakaf Produktif: Solusi Ekonomi Islam Modern*. Jakarta: Rajawali Pers, h 45.

¹⁶ Mansur, F. (2016). *Kebijakan Redistribusi Kekayaan pada Masa Abu Bakar*. Jakarta: Lentera Hati, h 53.

keadilan sosial. Zakat, selain sebagai kewajiban religius, berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan untuk kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan sosial. Abu Bakar menegaskan pentingnya zakat melalui dekrit, termasuk sanksi bagi yang menolak membayar, yang dikenal sebagai "perang melawan orang-orang yang menolak zakat. Ia juga mendorong kepedulian sosial antarumat Islam untuk membangun solidaritas serta membentuk lembaga pengelola zakat agar bantuan tepat sasaran.¹⁷

b) Kebijakan Ekonomi

Abu Bakar menerapkan kebijakan penting untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi umat Islam, termasuk pembentukan baitul mal sebagai lembaga pengelola dana publik, seperti zakat dan harta rampasan perang, yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.¹⁸ Kebijakan ini memperkuat fondasi ekonomi umat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Setelah perang Ridda, Abu Bakar mengambil langkah strategis untuk memulihkan ekonomi, seperti mengatur sistem perpajakan yang adil dan memastikan distribusi kekayaan merata, guna menjaga kestabilan sosial ekonomi dan mencegah ketidakpuasan masyarakat.¹⁹

c) Perdagangan dan Kemandirian Ekonomi

Abu Bakar mendorong kegiatan perdagangan dengan membangun jaringan yang lebih luas di dalam dan luar Jazirah Arab, serta membuka akses pasar untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Ia juga fokus pada kemandirian ekonomi dengan menggalakkan produksi lokal dan mendukung petani, yang meningkatkan hasil pertanian dan menciptakan peluang kerja, mengurangi ketergantungan pada impor.²⁰

d) Dampak Sosial Ekonomi

Kebijakan sosial dan ekonomi Abu Bakar memiliki dampak signifikan. Pertama, kesejahteraan masyarakat meningkat, terutama bagi golongan kurang mampu, melalui zakat dan bantuan sosial yang dikelola baitul mal. Kedua, stabilitas ekonomi yang dicapai mendukung pertumbuhan jangka panjang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan melalui perdagangan dan sektor pertanian. Ketiga, kebijakan ini memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, serta mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial dan.²¹

¹⁷ Fauzi, M. (2018). *Ekonomi Islam pada Masa Utsman bin Affan*. Surabaya: Al-Falah Press. h 75.

¹⁸ Nasution, R. (2019). *Nepotisme pada Masa Utsman bin Affan*. Surabaya: Bumi Aksara. h 89.

¹⁹ Yusuf, (2019). *Ekonomi Islam dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UII Press, h 104.

²⁰ *Opcit*, h 85.

²¹ *Opcit*, h 110.

2. Masa Umar Bin Khattab tahun 634-644 M atau 10 Tahun

a. Kebijakan Sosial

1) Zakat sebagai Alat Distribusi Kesejahteraan

Zakat menjadi pilar utama kebijakan sosial Umar bin Khattab sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Umar memperkuat sistem zakat yang dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dengan pengelolaan yang lebih sistematis. Ia menugaskan amil zakat di berbagai wilayah untuk memastikan zakat tersalurkan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan kaum dhuafa. Selain uang, zakat juga didistribusikan dalam bentuk kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, dengan tujuan utama memastikan tidak ada warga Muslim yang hidup dalam kemiskinan.²²

2) Lembaga Keuangan Publik (Baitul Maal)

Baitul Mal, yang diperkenalkan pada masa Abu Bakar, diperkuat oleh Umar bin Khattab sebagai lembaga keuangan publik untuk mengelola zakat, jizyah, dan kharaj. Lembaga ini berperan penting dalam distribusi kekayaan dan menjaga keadilan sosial, sesuai pandangan Umar bahwa baitul mal harus memastikan setiap individu mendapatkan haknya. Umar juga memanfaatkan dana baitul mal untuk membangun infrastruktur publik, seperti jalan, saluran irigasi, dan tempat penampungan musafir, guna meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.²³

b. Kebijakan Ekonomi

1) Distribusi Tanah

Kebijakan distribusi tanah merupakan langkah penting Umar bin Khattab dalam mengelola tanah hasil penaklukan. Untuk mencegah monopoli, Umar menetapkan bahwa tanah tersebut dikelola negara dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum, bukan dijual kepada individu atau kelompok tertentu. Kebijakan ini memastikan sumber daya negara tetap dalam kontrol publik dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya kalangan elit.²⁴

2) Pajak dan Pendapatan Negara

Umar bin Khattab memperkenalkan kebijakan perpajakan yang adil, termasuk jizyah, pajak untuk non-Muslim yang hanya dikenakan pada mereka yang mampu membayar, sementara kelompok miskin dibebaskan. Selain itu, ia menerapkan kharaj, pajak atas tanah

²² Mansur, (2017). Zakat dan Sistem Ekonomi Islam Kontemporer. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, h 172.

²³ *Opcit*, h 154.

²⁴ *Opcit*, h 89.

pertanian non-Muslim, yang menjadi sumber pendapatan penting untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Kebijakan perpajakan yang transparan dan adil ini berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat.²⁵

c. Dampak Kebijakan Sosial Ekonomi

Dampak dari kebijakan sosial ekonomi yang diterapkan oleh Umar bin Khattab sangat signifikan bagi perkembangan peradaban Islam. Beberapa dampak utama dari kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Keadilan Sosial yang Merata

Kebijakan zakat, baitul mal, dan distribusi tanah yang diterapkan oleh Umar berhasil menciptakan keadilan sosial yang merata. Tidak ada individu yang hidup dalam kemiskinan karena kebijakan ini memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil dan merata di seluruh masyarakat.²⁶

2) Pembangunan Infrastruktur

Kebijakan Umar yang mengalokasikan dana dari baitul mal untuk pembangunan infrastruktur publik telah membantu memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan, irigasi, dan sarana transportasi lainnya memperkuat sektor pertanian dan perdagangan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁷

3) Stabilitas Ekonomi

Melalui kebijakan pajak dan pengelolaan sumber daya alam yang baik, Umar bin Khattab berhasil menjaga stabilitas ekonomi negara. Pendapatan negara yang berasal dari zakat, jizyah, dan kharaj digunakan dengan bijak untuk kepentingan umum, yang pada gilirannya memperkuat ekonomi negara.²⁸

4) Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat

Dengan adanya kebijakan yang mendukung distribusi kekayaan, pembangunan infrastruktur, dan regulasi perdagangan yang adil, masyarakat pada masa Umar bin Khattab menikmati kemakmuran dan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.²⁹

3. Masa Utsman Bin Affan 644-656 M atau 12 Tahun

a. Kebijakan Sosial

²⁵ *Opcit*, h 161.

²⁶ *Opcit*, h 168.

²⁷ *Opcit*, h 103.

²⁸ *Opcit*, h 130.

²⁹ *Opcit*, h 199.

1). Kebijakan Zakat dan Baitul Mal

Pada masa Utsman bin Affan, zakat menjadi instrumen utama kebijakan sosial, dikelola melalui amil zakat untuk disalurkan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan orang terlilit utang, guna memastikan distribusi kekayaan yang adil.³⁰ Baitul Mal juga berperan penting dalam mengelola zakat, pajak, dan pendapatan negara, yang digunakan untuk pembangunan sosial, infrastruktur, dan bantuan publik.

2). Kebijakan Distribusi Tanah

Distribusi tanah merupakan bagian dari kebijakan sosial Utsman yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah yang baru ditaklukkan. Utsman melanjutkan kebijakan distribusi tanah yang sebelumnya diterapkan oleh Umar bin Khattab, di mana tanah hasil penaklukan dikelola oleh negara untuk kepentingan umum. Meski mendapatkritik terkait nepotisme, kebijakan ini tetap didasarkan pada prinsip kesejahteraan umum.³¹

3). Bantuan Sosial dan Proyek Publik

Utsman mengalokasikan dana dari Baitul Mal untuk membantu kelompok rentan dan membiayai proyek-proyek publik. Bantuan diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, serta mereka yang terlilit hutang. Selain itu, proyek pembangunan publik seperti pembangunan Masjid Nabawi dan peningkatan infrastruktur sosial juga menjadi bagian penting dari kebijakansosialnya. Masjid Nabawi berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, agama, dan ekonomi.³²

b. Kebijakan Ekonomi

1). Perdagangan Bebas dan Perluasan Jalur Dagang

Kebijakan ekonomi Utsman menitikberatkan pada pengembangan sektor perdagangan. Dengan mendukung perdagangan bebas dan membuka jalur dagang baru, terutama di wilayah yang baru ditaklukkan, Utsman berhasil meningkatkan aktivitas ekonomi. Jalur perdagangan laut dan darat dijaga ketat, dan pajak yang dikenakan terhadap impor serta pedagang asing tidak memberatkan. Hal ini mendorong perdagangan lintas wilayah dalam kekhilafahan dan

³⁰ Wahyu, A. (2019). *Sistem Ekonomi Islam: Kebijakan Sosial pada Masa Khalifah Utsman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. h 76.

³¹ Harun, I. (2020). *Ekonomi dan Politik Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h 139.

³² Halim, F. (2017). *Sejarah Pembangunan Masjid Nabawi di Masa Khulafaur Rasyidin*. Jakarta: Lentera Hati. h 109.

meningkatkan pendapatan negara.³³

2). Pengembangan Industri Lokal

Utsman juga mendukung pengembangan industri lokal, seperti tekstil, pertanian, dan kerajinan tangan. Dengan memberikan insentif kepada para pengrajin dan petani, serta memperluas akses ke pasar, Utsman mendorong peningkatan produksi lokal. Kebijakan ini berhasil menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah berkembangnya industri tekstil di Hijaz.³⁴

3). Pengelolaan Pajak dan Jizyah

Utsman melanjutkan sistem perpajakan yang telah diterapkan sebelumnya, di mana pajak tanah (*kharaj*) dan jizyah (pajak bagi non-Muslim) menjadi sumber pendapatan utama negara. Pajak dipungut dengan adil dan hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan. Jizyah diberlakukan hanya kepada non-Muslim yang mampu membayar, sedangkan yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban ini.³⁵

4). Eksploitasi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam, seperti tambang logam dan mineral, dieksploitasi secara bijak di bawah pemerintahan Utsman. Hasil dari eksploitasi ini menjadi sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan pasar. Kebijakan ini berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur.³⁶

5). Kebijakan Pertanian dan Sistem Irigasi

Utsman memprioritaskan sektor pertanian dengan memperbaiki dan memperluas sistem irigasi. Saluran-saluran air dibangun untuk mendukung lahan-lahan pertanian di wilayah yanggersang, sehingga meningkatkan produktivitas pertanian. Kebijakan ini penting karena sektor pertanian merupakan sumber utama penghidupan bagi sebagian besar masyarakat kekhalifahan.³⁷

c. Dampak Kebijakan Sosial Ekonomi Utsman bin Affan

1). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

³³ Ismail, R. (2018). *Perdagangan dan Kesejahteraan Ekonomi pada Masa Khalifah Utsman bin Affan*. Surabaya: Al-Furqan Press. h 117.

³⁴ Rahman, Z. (2016). *Kebijakan Ekonomi Islam pada Masa Kekhalifahan*. Bandung: Mizan. h 203.

³⁵ *Opcit*, h 145.

³⁶ Mansur, H. (2019). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Sejarah Islam*. Semarang: Pustaka Indonesia. h 39.

³⁷ Fauzi, A. (2020). *Pertanian dan Kebijakan Irigasi di Zaman Khulafaur Rasyidin*. Jakarta: Bumi Aksara. h 221.

Kebijakan zakat, distribusi tanah, dan pengembangan perdagangan yang diterapkan oleh Utsman bin Affan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pendapatan negara dari zakat, pajak, dan perdagangan digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur publik yang lebih baik.³⁸

2). Perkembangan Perdagangan dan Industri

Dengan adanya kebijakan yang mendukung perdagangan bebas dan industri lokal, sektor ekonomi tumbuh pesat. Perdagangan antarwilayah semakin kuat, dan produk-produk dari wilayah Islam semakin diminati di pasar internasional. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi negara secara.³⁹

3). Pembangunan Infrastruktur yang Masif

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Utsman, seperti perluasan Masjid Nabawi, pembangunan jalan, dan sistem irigasi, memberikan dampak yang sangat positif terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Infrastruktur yang lebih baik memudahkan mobilitas barang dan orang, serta mendukung pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.⁴⁰

4). Stabilisasi Ekonomi

Meski terdapat ketegangan politik pada akhir masa pemerintahannya, kebijakan ekonomi Utsman tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi negara. Pendapatan yang dihasilkan dari pajak, zakat, dan perdagangan cukup untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Sistem perpajakan yang adil dan transparan juga membantu menjaga stabilitas ekonomi.⁴¹

4. Ali bin Abi Thalib tahun 656-661M atau 6 Tahun

a. Kebijakan Sosial

Ali bin Abi Thalib, sebagai khalifah keempat, menghadapi berbagai tantangan sosial yang besar, termasuk perselisihan politik dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Meskipun demikian, Ali tetap berupaya menerapkan kebijakan sosial yang adil dan berdasarkan nilai-nilai Islam.

1). Keadilan Sosial

Keadilan sosial menjadi prinsip utama yang ditegakkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ia

³⁸ *Opcit*, h 123.

³⁹ *Opcit*, h 199.

⁴⁰ *Opcit*, h 235.

⁴¹ *Opcit*, h 211.

menentang segala bentuk ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang terjadi pada masyarakat saat itu. Ali mendorong adanya pemerataan kekayaan dan menentang penguasaan kekayaan oleh segelintir kelompok. Misalnya, ia mengkritik kebijakan favoritisme dalam distribusi kekayaan negara yang terjadi di masa sebelumnya, dan berupaya memperbaiki hal tersebut dengan menerapkan sistem distribusi kekayaan yang adil, terutama dari Baitul Mal.⁴²

2). Pembelaan terhadap Kaum Lemah

Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap kaum lemah. Ia sering kali memberikan perhatian khusus kepada fakir miskin, anak yatim, dan janda-janda yang tidak memiliki penopang. Kebijakan zakat dan sedekah pada masa Ali dikelola secara ketat agar sampai kepada yang berhak, dan Ali juga memperketat pengawasan agar tidak ada penyelewengan dalam proses distribusinya.⁴³

b. Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi Ali bin Abi Thalib berlandaskan pada prinsip keadilan dan penegakan syariah Islam. Tantangan ekonomi yang ia hadapi cukup besar, termasuk perpecahan politik dan perang saudara, namun Ali tetap berusaha mengatur kebijakan ekonomiyang bertujuan menjaga kesejahteraan rakyat.

1). Pembersihan Baitul Mal

Ali bin Abi Thalib berupaya membersihkan Baitul Mal dari segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan dana. Salah satu langkah besar yang dilakukan Ali adalah mengganti para pejabat Baitul Mal yang dianggap menyalahgunakan wewenang mereka dan melakukan penyelewengan dana negara. Ali menekankan bahwa dana Baitul Mal harus digunakan secara transparan dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.⁴⁴

2). Redistribusi Kekayaan

Ali menekankan pentingnya redistribusi kekayaan yang adil. Ia berusaha untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi pada masyarakat dengan cara memastikan bahwa hasil pajak dan pendapatan negara dialokasikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagai langkah nyata, Ali memberlakukan pajak yang lebih adil kepada para pemilik tanah, terutama di wilayah Irak dan Persia, yang menjadi basis utama pendapatan kekhalifahan.⁴⁵

⁴² *Opcit*, 87.

⁴³ Ismail, R. (2020). Kebijakan Ekonomi Ali bin Abi Thalib: Analisis Keadilan dalam Pengelolaan Baitul Mal. Surabaya: Al-Furqan Press. h 145.

⁴⁴ *Ibid*, h120.

⁴⁵ *Opcit*, h 112.

c. Dampak Sosial Ekonomi

Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib merupakan masa yang penuh tantangan akibat konflik politik yang tak kunjung selesai. Namun, kebijakan-kebijakan sosial dan ekonomi yang ia terapkan membawa dampak signifikan bagi masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya mencapai potensi maksimal akibat perang saudara yang terjadi.

1). Pemulihan Keadilan Sosial

Salah satu dampak sosial yang jelas terlihat dari kebijakan Ali adalah terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat. Dengan penegakan hukum yang ketat dan upaya redistribusi kekayaan, Ali berhasil mengurangi ketimpangan sosial yang sempat meluas pada masa sebelumnya. Meskipun kekacauan politik menjadi kendala, masyarakat yang berada di bawah wilayah kekuasaannya merasakan perbaikan dalam keadilan distribusi sumber daya.⁴⁶

2). Stabilitas Ekonomi yang Terhambat

Namun, dampak ekonomi tidak sepositif yang diharapkan. Konflik politik dan perang saudara, seperti Perang Jamal dan Perang Siffin, menyebabkan penurunan produktivitas ekonomi dan perdagangan. Sumber daya negara banyak terbuang untuk kebutuhan perang, sehingga pembangunan ekonomi mengalami hambatan yang signifikan. Banyak wilayah yang mengalami penurunan aktivitas ekonomi akibat konflik.⁴⁷

3). Pengaruh terhadap Kelas Sosial

Kebijakan Ali terhadap redistribusi kekayaan berdampak langsung pada kelas sosial di masyarakat. Kelas elit yang sebelumnya menikmati kekayaan lebih besar mendapatkan kontrol yang lebih ketat dari pemerintah, sedangkan kelas bawah merasakan manfaat dari kebijakan sosial yang lebih adil. Namun, kebijakan ini juga memicu ketidakpuasan dari sebagian kelompok elit, yang merasa hak mereka dikurangi.⁴⁸

Macam-Macam Kebijakan Sosial Ekonomi Yang Dibentuk

1. Masa Abu Bakar As-Siddiq

a. Penegakan Zakat sebagai Pilar Kesejahteraan Sosial

Pada masa Abu Bakar, penegakan zakat menjadi kebijakan sosial utama sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi. Zakat digunakan untuk membantu masyarakat miskin, anak yatim, dan kelompok rentan, dengan dampak signifikan pada kesejahteraan sosial-

⁴⁶ *Opcit*, h 155.

⁴⁷ Fauzi, M. (2019). *Perdagangan dan Ekonomi pada Masa Ali bin Abi Thalib*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. h 130.

⁴⁸ *Opcit*, h 102.

ekonomi.⁴⁹ Abu Bakar mengirim utusan ke berbagai wilayah untuk mengumpulkan zakat, yang kemudian dialokasikan guna mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Memerangi Gerakan Pemberontakan dan Klaim Kenabian Palsu

Dalam konteks sosial-politik, Abu Bakar mengambil tindakan tegas untuk memerangi kelompok-kelompok yang menolak membayar zakat dan para pengklaim kenabian. Perang Ridda yang dipimpin oleh Abu Bakar adalah respons terhadap pemberontakan yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Gerakan ini tidak hanya mengancam stabilitas politik, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan karena penolakan pembayaran zakat oleh beberapa suku.⁵⁰ Langkah Abu Bakar dalam menumpas pemberontakan ini menunjukkan komitmennya terhadap penyatuan umat Islam dan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi yang bergantung pada pelaksanaan zakat.

c. Perlindungan Terhadap Kaum Lemah

Abu Bakar dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap kaum lemah, termasuk anak yatim, fakir miskin, dan orang tua. Kebijakannya dalam mendistribusikan kekayaan melalui zakat dan sedekah difokuskan untuk melindungi kelompok-kelompok ini. Sebagai contoh, Abu Bakar sering kali memberikan bantuan kepada janda-janda dan anak yatim secara langsung, serta memastikan bahwa mereka tidak terlupakan dalam distribusi bantuan dari Baitul Mal.⁵¹

d. Pengelolaan Baitul Mal

Baitul Mal, di bawah kepemimpinan Abu Bakar, dikelola secara efektif untuk menyalurkan dana kepada yang membutuhkan dan mendukung kebutuhan negara. Sumber dana seperti zakat, jizyah, dan ghanimah digunakan secara transparan untuk keperluan masyarakat.⁵² Abu Bakar menekankan pengelolaan kekayaan negara yang baik, menghindari penyalahgunaan, dan memastikan distribusi yang adil kepada masyarakat yang berhak.

e. Kebijakan Redistribusi Kekayaan

Kebijakan ekonomi penting pada masa Abu Bakar adalah redistribusi kekayaan yang adil. Kekayaan dari zakat dan pajak disalurkan kepada masyarakat miskin dan yang

⁴⁹ Rahman, Z. (2019). Kebijakan Ekonomi pada Masa Khulafaur Rasyidin. Jakarta: Bumi Aksara. h 55.

⁵⁰ Iskandar, H. (2020). Pemerintahan dan Kebijakan Sosial Ekonomi Abu Bakar As-Siddiq. Surabaya: Al-Furqan Press. h 88.

⁵¹ *Opcit*, h 102.

⁵² *Opcit*, h 123.

membutuhkan, tanpa favoritisme politik atau kekuasaan.⁵³ Abu Bakar memperbaiki sistem distribusi zakat dan mendukung pemerataan ekonomi melalui Baitul Mal.

f. Penetapan Pajak dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Abu Bakar melanjutkan kebijakan perpajakan sebelumnya, mengenakan jizyah kepada non-Muslim sebagai pajak perlindungan. Pajak ini dikelola dengan baik dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kepentingan umum, serta diberlakukan adil berdasarkan kemampuan individu.⁵⁴ Selain itu, Abu Bakar mengelola sumber daya alam seperti tanah pertanian dan tambang untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, serta hasilnya dialokasikan untuk proyek infrastruktur dan sosial.

2. Masa Umar bin Khattab

a. Pendirian Diwan (Lembaga Administrasi)

Umar bin Khattab mendirikan sistem administrasi bernama Diwan untuk mengelola pendistribusian gaji tentara dan aparatur negara. Sistem ini terinspirasi dari administrasi Persia dan Romawi, namun disesuaikan dengan prinsip Islam. Diwan mencatat penerima tunjangan negara, seperti veteran perang, keluarga martir, dan orang miskin.⁵⁵ Melalui Diwan, Umar mendata pendapatan negara dari zakat, pajak, dan jizyah, serta mendistribusikannya secara adil, menciptakan sistem kesejahteraan negara dalam dunia Islam.

b. Kebijakan untuk Anak Yatim dan Fakir Miskin

Umar bin Khattab sangat peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin. Ia memperkenalkan kebijakan yang memberikan perhatian khusus pada anak yatim melalui panti asuhan dan pendidikan. Bantuan keuangan dari Baitul Mal juga disalurkan kepada fakir miskin dan orang tua yang tidak mampu bekerja.⁵⁶ Umar memberikan tunjangan bulanan kepada fakir miskin, mencerminkan komitmennya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, dengan hak-hak sosial dipenuhi oleh negara.

c. Pengelolaan Baitul Mal

Pada masa Umar bin Khattab, pengelolaan Baitul Mal menjadi lebih efisien dan terorganisir. Umar memperluas fungsi Baitul Mal untuk mengelola keuangan negara secara

⁵³ Mansur, F. (2016). Kebijakan Redistribusi Kekayaan pada Masa Abu Bakar. Jakarta: Lentera Hati. h 76.

⁵⁴ Ismail, R. (2017). Pengelolaan Pajak dan Sumber Daya pada Masa Khulafaur Rasyidin. Semarang: Pustaka Amanah. h 134.

⁵⁵ *Opcit*, h 45.

⁵⁶ Aziz, M. (2020). Kebijakan Sosial pada Masa Khulafaur Rasyidin. Bandung: Mizan, h 76.

menyeluruh, termasuk dana dari zakat, pajak, jizyah, dan kharaj (pajak tanah). Dana ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan kebutuhan militer.⁵⁷ Contohnya, dana Baitul Mal digunakan untuk membangun irigasi, jalan, dan pasar, yang mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi perdagangan. Umar juga memastikan bahwa dana disalurkan kepada yang berhak, seperti fakir miskin, anak yatim, dan veteran perang.

d. Reformasi Sistem Pajak

Salah satu kebijakan ekonomi utama Umar adalah reformasi perpajakan. Ia memperkenalkan pajak kharaj kepada non-Muslim pemilik tanah, berbeda dengan jizyah sebagai pajak perlindungan. Kharaj dikenakan pada pemilik tanah, baik Muslim maupun non-Muslim, dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.⁵⁸ Umar juga memperkenalkan zakat kepada umat Muslim, sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemerataan ekonomi, yang dikelola oleh Baitul Mal dan disalurkan kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang yang berutang.

e. Kebijakan Tanah

Umar bin Khattab memperkenalkan kebijakan agraria revolusioner, menetapkan bahwa tanah yang ditaklukkan tidak dibagikan kepada prajurit, tetapi tetap dikelola oleh penduduk lokal yang membayar kharaj sebagai pajak. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk kepentingan umum. Kebijakan ini mencegah monopoli tanah oleh elit, memastikan produktivitas tanah, dan mencegah eksploitasi ekonomi oleh kelompok militer.

f. Pembangunan Infrastruktur Perdagangan

Umar bin Khattab mendukung perdagangan dengan membangun infrastruktur seperti pasar, jalan, dan pelabuhan. Ia memahami pentingnya perdagangan bagi perekonomian dan mempercepat arus barang antarwilayah. Proyek penting termasuk pembangunan kanal dan sistem irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian.⁵⁹ Selain itu, Umar mendirikan pasar-pasar baru di kota-kota penting seperti Madinah dan Mekkah, yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan mempercepat pertumbuhan serta inovasi perdagangan.

g. Pengawasan Terhadap Aktivitas Pasar

Umar menerapkan pengawasan ketat di pasar untuk memastikan transaksi adil sesuai prinsip Islam, melarang riba dan penimbunan barang. Ia sering berkeliling pasar untuk

⁵⁷ *Opcit*, h 88.

⁵⁸ *Opcit*, h 54.

⁵⁹ Iskandar, Z. (2018). *Pengelolaan Pasar pada Masa Khulafaur Rasyidin*. Jakarta: Pustaka Amanah. h 98.

mencegah penipuan dan kecurangan.⁶⁰ Pengawasan ini menciptakan lingkungan perdagangan yang sehat dan aman, mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan adil, serta memastikan keuntungan layak bagi semua pihak.

3. Masa Utsman bin Affan

a. Pengembangan Sistem Wakaf

Salah satu kebijakan sosial utama Utsman bin Affan adalah pengembangan sistem wakaf. Ia melihat wakaf sebagai instrumen sosial berjangka panjang, contohnya saat ia membeli dan mewakafkan sumur Rumah di Madinah untuk digunakan oleh semua penduduk. Wakaf ini tidak hanya menyelesaikan masalah air di Madinah tetapi juga menjadi model pengelolaan sumber daya masyarakat. Utsman mendorong umat Islam untuk memanfaatkan kekayaan mereka melalui wakaf demi kepentingan umum, menunjukkan fokusnya pada kesejahteraan sosial.

b. Perlindungan Kaum Lemah

Utsman melanjutkan perhatian terhadap kaum lemah, seperti anak yatim, fakir miskin, dan janda, dengan mengalokasikan dana dari Baitul Mal untuk bantuan dan mendirikan panti-panti sosial untuk merawat anak yatim serta memberikan tunjangan kepada yang tidak mampu bekerja.⁶¹ Ia juga mendukung pembangunan masjid dan fasilitas umum, termasuk memperluas Masjid Nabawi di Madinah untuk menampung jumlah umat yang semakin banyak.

c. Pengelolaan Baitul Mal

Pada masa Utsman bin Affan, pengelolaan Baitul Mal mengalami reformasi dengan sistem yang lebih terstruktur, memastikan pendapatan negara dari zakat, jizyah, dan kharaj dikelola dengan baik dan transparan. Pendapatan dari pajak tanah dan jizyah meningkat berkat perluasan wilayah kekhalifahan.⁶² Utsman memperkuat fungsi Baitul Mal untuk pendistribusian kekayaan, menggunakan dana untuk administrasi negara, angkatan bersenjata, kesejahteraan sosial, dan pembangunan infrastruktur.

d. Kebijakan Redistribusi Kekayaan

Salah satu kebijakan ekonomi utama Utsman adalah redistribusi kekayaan melalui sistem zakat dan pajak yang efisien. Ia memperkenalkan reformasi pengumpulan zakat, memastikan setiap orang wajib melaksanakannya, serta memperbaiki distribusi zakat agar

⁶⁰ *Opcit*, h 132.

⁶¹ *Opcit*, h 88.

⁶² *Opcit*, h 112.

dana sampai kepada yang membutuhkan, termasuk fakir miskin dan yatim piatu.⁶³ Utsman juga memastikan masyarakat di wilayah baru mendapatkan akses yang sama terhadap kekayaan negara dan distribusi pajak dilakukan secara adil.

e. Kebijakan Agraria

Kebijakan agraria Utsman bin Affan sangat penting untuk menopang perekonomian negara, terutama setelah ekspansi wilayah ke Persia dan Afrika Utara. Ia mempertahankan kebijakan pajak tanah (kharaj) dengan tanah yang dikelola penduduk lokal tetap membayar pajak kepada negara.⁶⁴ Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan proyek sosial. Utsman memberikan lebih banyak kebebasan kepada pengelola tanah Muslim, meningkatkan produksi pertanian dan pertumbuhan ekonomi, tetapi menimbulkan ketidakpuasan karena dianggap menguntungkan kaum elit tertentu.

f. Peningkatan Infrastruktur Perdagangan

Sebagai pedagang sukses sebelum menjadi khalifah, Utsman memahami pentingnya perdagangan untuk ekonomi. Ia mendorong pembangunan infrastruktur perdagangan, termasuk perluasan pasar di kota-kota utama, meningkatkan arus barang dan jasa serta peluang perdagangan dengan wilayah luar kekhalifahan.⁶⁵ Utsman memperbaiki jalur perdagangan internasional dan memastikan akses pedagang ke pasar utama seperti Makkah, Madinah, Kufah, dan Basrah, meningkatkan kesejahteraan pedagang dan pertumbuhan ekonomi negara.

g. Pengaturan Harga dan Pengawasan Pasar

Untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah monopoli, Utsman memperkenalkan kebijakan pengawasan pasar yang ketat, dengan petugas khusus mengawasi transaksi dan mencegah kecurangan serta penimbunan barang. Ia melarang praktik-praktik merugikan seperti riba, sesuai prinsip ekonomi Islam.⁶⁶ Saat terjadi kelangkaan barang, Utsman segera mengintervensi pasar untuk mencegah lonjakan harga yang membebani masyarakat miskin.

4. Masa Ali Bin Abi Thalib

a. Reformasi Baitul Mal

Baitul Mal memainkan peran penting dalam ekonomi kekhalifahan. Pada masa Ali bin

⁶³ Hidayat, A. (2019). *Redistribusi Kekayaan pada Masa Khalifah Utsman*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. h 134.

⁶⁴ *Opcit*, h 145.

⁶⁵ Mansur, F. (2018). *Perdagangan pada Masa Kekhalifahan Utsman*. Semarang: Pustaka Amanah. h 190.

⁶⁶ Nasution, A. (2021). *Pengawasan Pasar dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Al-Huda Press. h 201.

Abi Thalib, terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Ali segera melakukan reformasi untuk memastikan pengelolaan yang adil sesuai prinsip Islam. Ia menegakkan distribusi kekayaan negara secara adil dengan memberikan tunjangan yang sama kepada setiap anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang suku atau status sosial, berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang menguntungkan golongan elit. Ali menekankan penggunaan kekayaan negara untuk kepentingan seluruh masyarakat, terutama kaum miskin.⁶⁷ Kebijakan ini mencerminkan komitmen Ali terhadap keadilan sosial dan distribusi merata kekayaan negara.

b. Pemberantasan Korupsi

Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemimpin yang tegas dalam menindak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia memberhentikan pejabat yang tidak jujur, termasuk mengganti Mu'awiyah, gubernur Syam, yang dianggap korup, dengan pejabat yang lebih adil dan berintegritas. Ali juga memberlakukan pengawasan ketat terhadap pejabat yang mengelola keuangan negara dan pajak.⁶⁸ Kebijakan ini bertujuan memastikan pejabat bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah, serta mencegah penyalahgunaan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi.

c. Kebijakan Redistribusi Kekayaan

Ali bin Abi Thalib memperkuat sistem zakat dan redistribusi kekayaan melalui zakat, sedekah, dan pajak, memastikan zakat dibayar dan didistribusikan kepada kaum miskin, anak yatim, janda, dan yang membutuhkan. Contohnya, ia mengelola harta rampasan perang secara adil, membagikannya tidak hanya kepada prajurit tetapi juga kepada masyarakat yang berhak, termasuk fakir miskin.

d. Kebijakan Pajak Tanah (Kharaj)

Ali bin Abi Thalib mengembangkan kebijakan pajak tanah yang adil, yaitu kharaj untuk non-Muslim dan zakat untuk Muslim. Ia memastikan sistem kharaj dijalankan adil tanpa membebani penduduk setempat. Ali melarang petugas pajak memungut pajak melebihi kemampuan petani dan memberikan keringanan bagi yang mengalami gagal panen atau kondisi sulit. Kebijakan ini mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan

⁶⁷ Al-Husaini, A. (2016). Kebijakan Ekonomi pada Masa Ali bin Abi Thalib. Jakarta: Bumi Aksara. h 102.

⁶⁸ Hakim, M. (2017). Ali bin Abi Thalib dan Reformasi Pemerintahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. h 88.

melindungi petani dari tekanan pajak yang berlebihan.⁶⁹

e. Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Umum

Ali bin Abi Thalib fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi untuk mendukung pertanian dan perdagangan. Contohnya, ia memerintahkan perbaikan sistem irigasi untuk meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan petani. Ali juga membangun fasilitas umum seperti masjid dan pasar yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Pembangunan ini berdampak positif pada perekonomian, meningkatkan produksi, perdagangan, dan kondisi hidup masyarakat.⁷⁰

Kekuatan Dan Kelemahan Sistem Yang Dibentuk

1. Masa Abu Bakar as-Siddiq

a. Kekuatan Sistem Pemerintahan Abu Bakar as-Siddiq

1). Konsolidasi dan Stabilitas Politik

Abu Bakar as-Siddiq berhasil mengonsolidasikan kekuasaan dan mempertahankan stabilitas politik di masa kekhalifahannya, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu tantangan besar yang dihadapinya adalah munculnya pemberontakan dari beberapa suku Arab yang menolak membayar zakat dan mengklaim kemerdekaan dari Madinah. Abu Bakar berhasil mengatasi krisis ini melalui Perang Riddah, yang menegakkan kembali kewibawaan kekhalifahan dan memulihkan persatuan umat Islam.⁷¹

2). Keberhasilan Penaklukan Wilayah

Di bawah kepemimpinan Abu Bakar, ekspansi wilayah Islam mulai berkembang ke luar Jazirah Arab, meskipun terbatas. Khalifah Abu Bakar memulai ekspansi ke wilayah kekaisaran Persia dan Bizantium, yang memberikan pijakan awal bagi perkembangan kekhalifahan di masa-masa mendatang. Ekspansi ini meningkatkan pengaruh politik dan ekonomi Islam serta memperkuat legitimasi pemerintahan Abu Bakar.⁷²

3). Sistem Zakat dan Distribusi Kekayaan

Abu Bakar menekankan pentingnya sistem zakat sebagai salah satu pilar ekonomi Islam. Salah satu kekuatannya adalah pemahaman bahwa zakat harus dikelola dengan adil dan didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Melalui kebijakan ini, Abu Bakar

⁶⁹ Nasir, M. (2019). Pajak dan Pertanian pada Masa Ali bin Abi Thalib. Surabaya: Al-Falah Press. h 175.

⁷⁰ Yusuf, F. (2020). Infrastruktur pada Masa Khulafaur Rasyidin. Jakarta: Lentera Hati. h 210.

⁷¹ Fathurrahman, A. (2017). Krisis Politik dan Perang Riddah: Kekuatan Pemerintahan Abu Bakar. Jakarta: Lentera Hati. h 45.

⁷² *Opcit*, h 97.

memastikan kesejahteraan masyarakat miskin dan kelompok-kelompok yang rentan. Kebijakan ini menciptakan keseimbangan sosial yang lebih baik di dalam masyarakat.⁷³

b. Kelemahan Sistem Pemerintahan Abu Bakar as-Siddiq

1). Konflik Internal dan Tantangan Kesukuan

Meskipun berhasil mengatasi beberapa pemberontakan dalam Perang Riddah, masa kekhalifahan Abu Bakar juga dihadapkan pada permasalahan internal, terutama dalam hal kesukuan. Beberapa suku Arab masih menunjukkan ketidakpuasan atas sentralisasi kekuasaan di Madinah. Tantangan kesukuan ini mengungkapkan bahwa sistem politik pada masa Abu Bakar masih rentan terhadap perpecahan yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan regional.⁷⁴

2). Keterbatasan Sumber Daya Militer

Meskipun ekspansi wilayah mulai dilakukan, pasukan militer yang dimiliki oleh Abu Bakar pada masa awal kekhalifahannya masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan ekonomi dan kurangnya persiapan dalam menghadapi ancaman eksternal seperti Persia dan Bizantium. Kekurangan sumber daya militer ini membuat ekspansi lebih lambat dan membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat Islam.⁷⁵

3). Ketergantungan pada Beberapa Figur Penting

Kekhalifahan Abu Bakar sangat bergantung pada loyalitas figur-figur penting seperti Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid dalam menjalankan pemerintahan dan menghadapi ancaman pemberontakan. Ketergantungan ini bisa menjadi kelemahan karena jika terjadi pergantian atau konflik internal antara mereka, kekuatan politik dan militer kekhalifahan bisa terganggu.⁷⁶

2. Masa Umar bin Khattab

a. Kekuatan Sistem Pemerintahan Umar bin Khattab

1). Reformasi Administratif dan Birokrasi

Umar bin Khattab dikenal sebagai khalifah yang melakukan reformasi besar dalam sistem administrasi dan birokrasi pemerintahan Islam. Ia mendirikan Diwan (departemen administrasi) yang berfungsi untuk mencatat dan mengelola berbagai aspek pemerintahan, seperti pendapatan negara, distribusi gaji tentara, dan catatan penduduk. Reformasi ini

⁷³ *Opcit*, h 11.

⁷⁴ *Opcit*, h 56.

⁷⁵ Hidayat, F. (2018). *Sumber Daya Militer di Awal Kekhalifahan Islam*. Bandung: Al-Falah Press. h 82.

⁷⁶ *Opcit*, h 110.

memperkuat struktur administrasi negara dan membuat pemerintahan lebih efisien dan terorganisir.⁷⁷

2). Pembangunan Infrastruktur Publik

Di bawah pemerintahan Umar, banyak infrastruktur publik yang dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Umar membangun jalan, jembatan, kanal irigasi, serta memperbaiki sistem air minum di berbagai wilayah kekhalifahan. Pembangunan ini berperan penting dalam mendukung ekonomi agraris dan perdagangan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁷⁸

c). Penaklukan dan Ekspansi Wilayah

Umar bin Khattab berhasil memperluas wilayah kekhalifahan Islam dengan menaklukkan Persia dan sebagian besar wilayah kekaisaran Bizantium. Penaklukan ini tidak hanya memperbesar wilayah kekhalifahan, tetapi juga meningkatkan sumber daya ekonomi negara melalui pajak dan hasil bumi dari wilayah-wilayah baru. Keberhasilan ini memperkuat stabilitas politik dan ekonomi kekhalifahan.⁷⁹

b. Kelemahan Sistem Pemerintahan Umar bin Khattab

1). Kesenjangan Ekonomi yang Masih Ada

Meskipun Umar bin Khattab berupaya melakukan distribusi kekayaan yang adil melalui kebijakan zakat dan jizya (pajak non-Muslim), kesenjangan ekonomi masih ada, terutama di antara para elite dan masyarakat biasa. Sebagian besar kekayaan yang diperoleh dari penaklukan baru terkonsentrasi pada elite militer dan administrasi, sementara masyarakat biasadi beberapa wilayah masih mengalami kemiskinan.⁸⁰

2). Konflik Antar Wilayah dan Kesukuan

Penaklukan yang cepat di bawah pemerintahan Umar juga menciptakan ketegangan di antara wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Beberapa wilayah yang baru ditaklukkan tidak sepenuhnya setuju dengan pemerintahan Islam dan masih menuntut otonomi. Umar harus menghadapi pemberontakan kecil di beberapa wilayah yang belum sepenuhnya mengakui kekuasaan kekhalifahan.⁸¹

3). Tantangan dalam Sistem Militer

Sistem militer Umar bin Khattab sangat bergantung pada loyalitas dan kemampuan para

⁷⁷ *Opcit*, h 35.

⁷⁸ *Opcit*, h 82.

⁷⁹ *Opcit*, h 101.

⁸⁰ *Opcit*, h 56.

⁸¹ *Opcit*, h 115.

komandan militer. Meskipun pasukannya kuat dan berhasil dalam banyak penaklukan, beberapa masalah muncul ketika para komandan militer memiliki ambisi pribadi. Dalam beberapa kasus, konflik internal di antara para komandan militer menyebabkan ketegangan dalam struktur militer kekhalfahan.

3. Masa Usman Bin Affan

a. Kekuatan Sistem Pemerintahan Utsman bin Affan

1). Ekspansi Wilayah yang Berkelanjutan

Di bawah pemerintahan Utsman bin Affan, ekspansi wilayah kekhalfahan terus berlanjut. Utsman berhasil menaklukkan wilayah yang lebih luas, termasuk Afrika Utara dan sebagian besar wilayah Persia. Penaklukan ini memperkuat posisi kekhalfahan sebagai kekuatan global dan meningkatkan pemasukan negara melalui pajak dari wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan.⁸²

2). Pembukuan Mushaf Al-Qur'an

Salah satu prestasi terbesar dari pemerintahan Utsman bin Affan adalah standarisasi dan pembukuan Al-Qur'an. Sebelum masa Utsman, Al-Qur'an telah ditulis dalam berbagai dialek dan format. Utsman memerintahkan untuk menstandarisasi bacaan Al-Qur'an agar tidak terjadi perbedaan interpretasi di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Langkah ini berhasil menjaga kesatuan umat Islam dan memastikan bahwa Al-Qur'an tetap otentik.⁸³

3). Kebijakan Ekonomi yang Mendukung Perdagangan

Pada masa Utsman, perdagangan mengalami perkembangan pesat karena stabilitas politik yang lebih baik dan wilayah kekhalfahan yang semakin luas. Kebijakan ekonomi Utsman memfokuskan pada pengembangan jalur perdagangan dan peningkatan hubungan dagang dengan wilayah non-Muslim. Hal ini memberikan manfaat besar bagi pedagang Muslim dan memperkuat perekonomian negara.⁸⁴

b. Kelemahan Sistem Pemerintahan Utsman bin Affan

1). Nepotisme dalam Penunjukan Pejabat

Salah satu kritik utama terhadap pemerintahan Utsman bin Affan adalah penunjukan keluarga dan kerabat dekatnya dalam posisi penting di pemerintahan, yang sering dianggap sebagai tindakan nepotisme. Utsman memberikan kekuasaan kepada anggota keluarganya, termasuk Muawiyah bin Abu Sufyan di Syam. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di

⁸² Hasan, M. (2019). Ekspansi Wilayah di Bawah Utsman bin Affan. Yogyakarta: Pustaka Amanah. h 72.

⁸³ *Opcit*, h 83.

⁸⁴ *Opcit*, h 98.

kalangan masyarakat, terutama di kalangan oposisi politik, dan memicu ketegangan di dalam negeri.⁸⁵

2). Pemberontakan dan Ketidakpuasan Publik

Kebijakan nepotisme dan distribusi kekayaan yang tidak merata di beberapa wilayah menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Beberapa wilayah yang sebelumnya mendukung kekhalfahan mulai melancarkan pemberontakan terhadap Utsman. Puncak ketidakpuasan terjadi dengan terjadinya pemberontakan di Mesir, yang akhirnya menyebabkan terbunuhnya Utsman bin Affan.⁸⁶

3). Ketidakmerataan Distribusi Kekayaan

Meskipun kekhalfahan Utsman bin Affan menikmati pemasukan yang besar dari pajak wilayah yang ditaklukkan, distribusi kekayaan tidak merata. Sebagian besar kekayaan dikuasai oleh kelompok elite, terutama di wilayah-wilayah yang lebih maju seperti Syam dan Mesir. Ketidakmerataan ini memicu perpecahan dan ketidakpuasan di antara masyarakat, terutama di kalangan masyarakat yang lebih miskin.⁸⁷

3. Masa Ali Bin Abi Thalib

a. Kekuatan Sistem Pemerintahan Ali bin Abi Thalib

1). Keberanian dalam Memerangi Ketidakadilan

Salah satu kekuatan utama dari sistem pemerintahan Ali bin Abi Thalib adalah tekadnya untuk melawan ketidakadilan dan menjaga keadilan di seluruh kekhalfahan. Ali mengambil langkah tegas untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk mengambil tindakan terhadap para pejabat yang korup dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Ali dikenal karena keadilannya dan keyakinannya bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan masyarakat luas.⁸⁸

2). Reformasi dalam Sistem Administrasi dan Birokrasi

Ali bin Abi Thalib juga berusaha memperbaiki sistem administrasi dan birokrasi kekhalfahan. Ia melakukan reformasi dalam pengelolaan pajak dan distribusi kekayaan agar lebih merata dan adil. Ali mengganti beberapa pejabat yang dianggap tidak kompeten dan berupaya memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah setelah periode kekacauan

⁸⁵ *Opcit*, h 67.

⁸⁶ Zahra, A. (2017). Pemberontakan pada Masa Utsman bin Affan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. h 103.

⁸⁷ Mahmud, Y. (2020). Distribusi Kekayaan pada Masa Utsman bin Affan. Bandung: Mizan. h 88.

⁸⁸ Hasan, M. (2020). Sistem Pemerintahan dan Keadilan pada Masa Ali bin Abi Thalib. Yogyakarta: Pustaka Amanah. h 89.

politik yang dialami di masa sebelumnya.⁸⁹

3). Penegakan Hukum yang Kuat

Penegakan hukum menjadi salah satu pilar utama dalam pemerintahan Ali. Ia memperlakukan semua orang dengan adil, baik dari kalangan elite maupun rakyat biasa. Ali menolak memberikan hak istimewa kepada siapa pun dan menegakkan hukum dengan tegas berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menjadikan masa pemerintahannya sebagai salah satu contoh terbaik dalam hal keadilan sosial dan hukum.⁹⁰

b. Kelemahan Sistem Pemerintahan Ali bin Abi Thalib

1). Konflik Internal dan Perang Saudara

Masa pemerintahan Ali diwarnai oleh konflik internal yang hebat, termasuk perang saudara yang dikenal sebagai Perang Jamal dan Perang Shiffin. Konflik ini disebabkan oleh perpecahan politik yang tajam di kalangan umat Islam, terutama antara pendukung Ali dan kelompok lain yang menuntut balas atas pembunuhan Utsman bin Affan. Ketidakstabilan politik ini mengurangi efektivitas pemerintahan Ali dan mengganggu pembangunan sosial ekonomi.⁹¹

2). Kesulitan dalam Mengelola Wilayah yang Luas

Salah satu kelemahan signifikan dalam pemerintahan Ali adalah kesulitannya dalam mengelola kekhalifahan yang luas dan beragam. Ali menghadapi perlawanan di beberapa wilayah yang sebelumnya mendukung Utsman bin Affan, sehingga membuat pemerintahannya mengalami ketidakstabilan dan krisis kepercayaan di beberapa bagian kekhalifahan. Beberapa wilayah seperti Syam (yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan) memberontak dan tidak mengakui kekuasaan Ali.⁹²

3). Kesulitan Ekonomi akibat Perang

Perang saudara yang terjadi selama pemerintahan Ali berdampak negatif pada perekonomian kekhalifahan. Sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat banyak terpakai untuk mendanai perang. Konflik-konflik ini mengganggu perdagangan dan pertanian, yang merupakan dua sektor utama dalam perekonomian Arab pada masa itu.

⁸⁹ Mahmud, Y. (2017). Reformasi Administrasi pada Masa Ali bin Abi Thalib. Bandung: Mizan. h 65.

⁹⁰ *Opcit*, h 45.

⁹¹ *Opcit*, h 112.

⁹² *Opcit*, h 92.

Pengaruh Perkembangan Sosial Ekonomi Masa Khulafaur Rasyidin terhadap Peradaban Islam

1. Pengaruh Sosial Ekonomi pada Masa Abu Bakar as-Siddiq

Pada masa pemerintahan Abu Bakar, perkembangan sosial ekonomi sangat dipengaruhi oleh upaya menjaga persatuan umat Islam pasca wafatnya Rasulullah. Salah satu tindakan signifikan adalah pengiriman pasukan untuk memerangi pemberontak dalam Perang Riddah, yang berhasil menyatukan kembali wilayah kekuasaan Islam. Stabilitas politik yang dihasilkan berdampak positif pada perkembangan ekonomi, dengan terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah kekhalifahan, sehingga perdagangan kembali berkembang, terutama di Mekkah dan Madinah.

Selain itu, Abu Bakar membentuk sistem distribusi zakat dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Kebijakan ini berhasil memperbaiki kondisi sosial masyarakat, terutama bagi kaum fakir dan miskin. Abu Bakar berupaya menjaga kesetaraan sosial dalam masyarakat Islam dengan memberlakukan sistem zakat yang adil.⁹³

2. Pengaruh Sosial Ekonomi pada Masa Umar bin Khattab

Pemerintahan Umar bin Khattab menandai era keemasan sosial ekonomi Islam, dengan ekspansi wilayah hingga Persia dan Romawi Timur yang memperkaya sumber daya ekonomi umat Islam. Perluasan wilayah ini menghasilkan lebih banyak pajak dan pemasukan negara dari wilayah taklukan.⁹⁴ Salah satu pencapaian penting Umar adalah pembentukan Baitul Mal, yang mengelola pemasukan negara seperti pajak, zakat, dan harta rampasan perang, serta menggunakan dana untuk pembangunan infrastruktur, jaminan sosial, dan bantuan kepada masyarakat miskin.

3. Pengaruh Sosial Ekonomi pada Masa Utsman bin Affan

Pada masa Utsman bin Affan, perdagangan berkembang pesat dengan kebijakan ekonomi yang mendukung konektivitas antarwilayah Islam dan pembangunan jalur perdagangan baru. Utsman juga memperkuat angkatan laut untuk mengamankan jalur perdagangan.⁹⁵ Namun, kebijakan Utsman yang memprioritaskan keluarga dalam penunjukan pejabat menimbulkan ketidakpuasan dan ketegangan sosial, yang melemahkan stabilitas sosial dan memicu pemberontakan di akhir pemerintahannya.⁹⁶

⁹³ Aziz, M. (2020). Kebijakan Sosial pada Masa Khulafaur Rasyidin. Bandung: Mizan. h 23.

⁹⁴ Opcit, h 67.

⁹⁵ Opcit, h 99.

⁹⁶ Opcit, h 56.

4. Pengaruh Sosial Ekonomi pada Masa Ali bin Abi Thalib

Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ditandai oleh konflik internal, terutama Perang Jamal dan Shiffin, yang menghambat perkembangan ekonomi karena alokasi sumber daya untuk perang. Meski demikian, Ali berusaha memperbaiki kesejahteraan sosial dan melawan korupsi dengan memecat pejabat yang tidak jujur.⁹⁷ Pada masa Khulafaur Rasyidin, kebijakan zakat dan persatuan umat Abu Bakar membentuk fondasi sosial, Umar bin Khattab memperkenalkan reformasi ekonomi dan Baitul Mal, Utsman bin Affan meningkatkan perdagangan meski terdapat nepotisme, dan Ali berupaya menegakkan keadilan meski konflik menghambat kemajuan ekonomi.

KESIMPULAN

Perkembangan sosial dan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin memberikan dampak signifikan terhadap peradaban Islam. Kebijakan Abu Bakar as-Siddiq menekankan persatuan dan distribusi zakat yang membantu memperkuat kesejahteraan sosial umat Islam. Umar bin Khattab memperluas wilayah kekhalifahan dan memperkenalkan Baitul Mal sebagai institusi keuangan yang vital, mengelola pajak, zakat, dan harta rampasan perang untuk kesejahteraan masyarakat. Pada masa Utsman bin Affan, ekonomi Islam semakin berkembang melalui perdagangan, meskipun kebijakan nepotisme menimbulkan ketegangan sosial. Ali bin Abi Thalib, meski menghadapi banyak konflik internal, berupaya menegakkan keadilan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Namun, ketegangan politik dan perang saudara menghambat pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Secara keseluruhan, masa Khulafaur Rasyidin menjadi fondasi kuat bagi peradaban Islam dalam membangun sistem sosial ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan stabilitas politik, meski setiap periode menghadapi tantangan yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed & Habib. (2016). *Islamic Economic Institutions and the Elimination of Poverty*. London: IslamicRelief Worldwide.
- Al-Husaini, A. (2016). *Kebijakan Ekonomi pada Masa Ali bin Abi Thalib*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Auda & Jasser. (2017). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.

⁹⁷ Opcit, h 75.

- Aziz, M. (2020). *Kebijakan Sosial pada Masa Khulafaur Rasyidin*. Bandung: Mizan.
- Chapra & Umer, M. (2017). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Faruqi & Raji, I. (2016). *Islamic Social and Economic Systems*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Fathurrahman, A. (2017). *Krisis Politik dan Perang Riddah: Kekuatan Pemerintahan Abu Bakar*. Jakarta: Lentera Hati.
- Fathurrahman, A. (2018). *Penegakan Hukum pada Masa Ali bin Abi Thalib*. Jakarta: Lentera Hati.
- Fauzan, A. (2016). *Ali bin Abi Thalib: Pemimpin dalam Keadilan dan Kesetaraan*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Fauzi, A. (2020). *Pertanian dan Kebijakan Irigasi di Zaman Khulafaur Rasyidin*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fauzi, I. (2018). *Kebijakan Ekonomi Utsman bin Affan dan Perdagangan*. Bandung: Al-Falah Press.
- Fauzi, M. (2018). *Ekonomi Islam pada Masa Khalifah Pertama*. Bandung: Mizan.
- Fauzi, M. (2018). *Ekonomi Islam pada Masa Utsman bin Affan*. Surabaya: Al-Falah Press.
- Fauzi, M. (2019). *Perdagangan dan Ekonomi pada Masa Ali bin Abi Thalib*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hakim, M. (2017). *Ali bin Abi Thalib dan Reformasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harun, I. (2020). *Ekonomi dan Politik Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, M. (2019). *Ekspansi Wilayah di Bawah Utsman bin Affan*. Yogyakarta: Pustaka Amanah.
- Hasan, M. (2020). *Sistem Pemerintahan dan Keadilan pada Masa Ali bin Abi Thalib*. Yogyakarta: Pustaka Amanah.
- Hidayat, A. (2019). *Redistribusi Kekayaan pada Masa Khalifah Utsman*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayat, F. (2018). *Sumber Daya Militer di Awal Kekhalifahan Islam*. Bandung: Al-Falah Press.
- Iqbal & Zamir. (2018). *Islamic Finance and Economic Development: Risk, Regulation, and Corporate Governance*. New York: Palgrave Macmillan.
- Iskandar, H. (2020). *Pemerintahan dan Kebijakan Sosial Ekonomi Abu Bakar As-Siddiq*. Surabaya: Al-Furqan Press.
- Iskandar, Z. (2018). *Pengelolaan Pasar pada Masa Khulafaur Rasyidin*. Jakarta: Pustaka Amanah.
- Ismail, R. (2017). *Pengelolaan Pajak dan Sumber Daya pada Masa Khulafaur Rasyidin*. Semarang: Pustaka Amanah.
- Ismail, R. (2018). *Perdagangan dan Kesejahteraan Ekonomi pada Masa Khalifah Utsman bin Affan*. Surabaya: Al-Furqan Press.
- Ismail, R. (2020). *Kebijakan Ekonomi Ali bin Abi Thalib: Analisis Keadilan dalam Pengelolaan Baitul Mal*. Surabaya: Al-Furqan Press.

- Khan, Fahim. *Essays in Islamic Economics*. Islamabad: International Institute of Islamic Economics, 2017.
- Mahmud, Y. (2017). *Reformasi Administrasi pada Masa Ali bin Abi Thalib*. Bandung: Mizan.
- Mahmud, Y. (2020). *Distribusi Kekayaan pada Masa Utsman bin Affan*. Bandung: Mizan.
- Mansur, Agus. *Zakat dan Sistem Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Mansur, F. (2016). *Kebijakan Redistribusi Kekayaan pada Masa Abu Bakar*. Jakarta: Lentera Hati.
- Mansur, F. (2018). *Perdagangan pada Masa Kekhalifahan Utsman*. Semarang: Pustaka Amanah.
- Mansur, H. (2019). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Sejarah Islam*. Semarang: Pustaka Indonesia.
- Nasir, M. (2019). *Pajak dan Pertanian pada Masa Ali bin Abi Thalib*. Surabaya: Al-Falah Press.
- Nasution, A. (2021). *Pengawasan Pasar dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Al-Huda Press.
- Nasution, Adiwarman.(2017). *Wakaf Produktif: Solusi Ekonomi Islam Modern*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Nasution, R. (2019). *Nepotisme pada Masa Utsman bin Affan*. Surabaya: Bumi Aksara.
- Rahman, A. (2020). *Pembukuan Al-Qur'an pada Masa Utsman bin Affan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rahman, Z. (2016). *Kebijakan Ekonomi Islam pada Masa Kekhalifahan*. Bandung: Mizan.
- Rahman, Z. (2019). *Loyalitas dan Ketergantungan pada Figur Penting*. Surabaya: Al-Falah Press.
- Shihab, Quraish.(2016). *Islam yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam*. Jakarta: Lentera Hati.
- Wahyu, A. (2017). *Sejarah Sosial Ekonomi Islam: Kebijakan Sosial Masa Khulafaur Rasyidin*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyu, A. (2019). *Sistem Ekonomi Islam: Kebijakan Sosial pada Masa Khalifah Utsman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf, Abdullah. (2019). *Ekonomi Islam dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Yusuf, F. (2020). *Infrastruktur pada Masa Khulafaur Rasyidin*. Jakarta: Lentera Hati.
- Zahra, A. (2017). *Pemberontakan pada Masa Utsman bin Affan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.